



Judul	: BAKN belum bisa cegah mafia anggaran
Tanggal	: Selasa, 28 Mei 2013
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 3

BAKN belum Bisa Cegah Mafia Anggaran

PATUT diakui bahwa undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dihasilkan setiap tahun merupakan produk pemerintah. Hal itu sudah menjadi tradisi legislasi selama ini.

"Meskipun secara aturan tidak diatur, perumusan UU APBN dianggap telah menjadi tradisi pemerintah untuk membuatnya dan disahkan oleh DPR RI," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti dalam workshop tentang efektivitas pengawasan keuangan oleh DPR RI, di Jakarta, kemarin.

Walaupun saat ini DPR memiliki Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN),

kata dia, hal itu tidak efektif karena hanya bertugas melakukan audit pascapenganggaran. Untuk itu, diperlukan sebuah strategi pengawasan keuangan negara oleh DPR dan pemetaan posisi BAKN dalam kerangka efektivitas keuangan negara.

"Problem kita BAKN tidak efektif, padahal tugasnya melakukan audit. Selama ini yang dilakukan pascaaudit," tegas Ray.

Idealnya, lanjut Ray, BAKN mesti diorientasikan melakukan telaah sebelum anggaran dikucurkan. "UU yang murni pemerintah hanya APBN, tapi itu tradisi, bukan sistem. Kami berharap ada perubahan," ujarnya.

Ray menambahkan, seha-

rusnya DPR memiliki ranjang APBN dan APBN-P yang kemudian digodok guna mencari anggaran yang paling layak untuk digunakan. Jika selama ini perencanaan APBN dan APBN-P hanya dilaksanakan pemerintah, mereka akan sulit untuk mengevaluasi.

Direktur Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam menambahkan, ada masalah yang perlu diberahi dalam penganggaran di DPR. Hadirnya BAKN pun seperti tidak berarti saat tradisi penganggaran hanya dilakukan pemerintah, khususnya soal APBN.

Seharusnya, kata dia, BAKN tidak hanya menelaah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi juga bisa menerima laporan ma-

syarakat.

"Dari segi regulasi ada persoalan serius di tubuh DPR, khususnya BAKN. Dalam hal ini BAKN hanya menelaah. Kami mendorong laporan masyarakat ke BAKN, bukan hanya menelaah hasil audit BPK," cetus Arif.

Anggota BAKN DPR Eva Kusuma Sundari menyambut baik usulan IBC dan berbagai LSM terkait dengan penguatannya BAKN. Namun, yang perlu didorong ialah pembentukan pengawasan oleh publik terhadap keuangan negara.

"Teman-teman harus didorong membentuk pengawasan publik dan BAKN dari sisi parlemen. Pengawasan itu harus dikeroyok," paparnya. (Pit/P-3)